



Indisipliner PNS Masih Tinggi

Sebagian Besar Diberi Sanksi Berat

JOGJA - Kedisiplinan menjadi masalah serius aparaturnya pemerintah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Ini terlihat dari kinerja aparaturnya pemerintah setahun lalu. Tingkat indisipliner mengalami peningkatan. Berdasarkan data Inspektorat Kota Jogja, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sepanjang 2014, indisipliner PNS meningkat mencapai 72 persen dibandingkan 2013 silam.

Pada tahun 2014 lalu, jumlah PNS yang indisipliner mencapai 19 kasus. Ini berarti alami peningkatan tujuh kasus dari tahun 2013 yang hanya 11 kasus. Akibat pelanggaran disiplin ini, Inspektorat Kota Jogja menjatuhkan sanksi kepada 17 orang. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dari tahun lalu yang hanya enam orang. "Sebagian besar mendapatkan sanksi berat. Sesuai dengan kategori pelanggaran disiplinnya," kata Inspektur Kota Jogja Wahyu Widayat di sela gelar pengawasan daerah di Balai Kota Jogja, kemarin (26/5).

Ia menambahkan, sanksi terberat

berupa pemecatan. Untuk pemecatan ada dua oknum PNS. Selain itu, ada penurunan pangkat lebih rendah selama tiga tahun, yakni enam oknum PNS. "Paling fatal diberhentikan karena melanggar PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS," tutur Wahyu.

Dari semua kasus yang berhasil mereka selesaikan, berawal dari dua hal. Yang paling banyak masih berupa laporan atau keluhan dari masyarakat yang bersumber dari Unit Pelayanan dan Keluhan (UPIK).

"Mayoritas dari laporan masyarakat," ujarnya.

Selain laporan masyarakat, penyebab terkuaknya kasus pelanggaran disiplin PNS ini, karena laporan rekan kerja. Yaitu, atasan langsung yang melaporkan pelanggaran anak buahnya ke inspektorat.

"Ini patut diapresiasi. Berarti, pengawasan langsung atasan, jalan. Mereka juga tidak nyaman ketika melihat anak buahnya yang melakukan pelanggaran. Bukan malah menutupi," tandasnya.

Hasil pemeriksaan inspektorat juga menyebutkan jumlah instansi yang ditemukan ada kasus menurun. Dari 72 instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mereka periksa, ada lima

instansi yang ditemukan kasus. Dari kelima instansi tersebut, ada salah satu instansi yang terdapat dua kasus, dan jumlah total ada enam temuan kasus.

Memasuki kuartal kedua tahun ini, Inspektorat Kota Jogja juga telah menemukan lima kasus. Inspektorat juga tengah melakukan pemeriksaan tersangka korupsi dana Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW).

"Masih dalam pemeriksaan. Kami juga sedang memeriksa khusus adanya empat kasus lain. Total sampai saat ini ada lima kasus," tandas mantan Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja ini.

Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Ali Fahmi memberikan apresiasi hasil pemeriksaan ini. Fahmi mendesak inspektorat bisa memperketat pengawasan. "Yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti dana PEW, seharusnya bisa diantisipasi. Masyarakat jangan dikorbankan," ujar Fahmi.

Politikus dari PAN ini berharap, celah pelanggaran harus bisa terus diperketat. Termasuk pengawasan antarpegawai. "Bawahan yang melaporkan atasan juga harus mendapatkan jaminan keamanan. Itu penting," katanya. (eri/jko/nn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005